

## IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH

Muhniansyah Arasyid Mahani  
UIN Antasari Banjamasin  
[muhnimahaniantasari@gmail.com](mailto:muhnimahaniantasari@gmail.com)

### Abstrak

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, merupakan model pendekatan pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar atau mandiri kepada sekolah dalam pengambilan keputusan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, dibandingkan dengan paradigma manajemen pendidikan yang dulu sentralistik yang telah berjalan lama sering kali membuat sekolah kurang responsif terhadap kebutuhan lokal dan karakteristik siswa masing-masing.

**Kata Kunci:** Implementasi, Manajemen Berbasis Sekolah, Mutu Pendidikan

### Abstract

*The implementation of School-Based Management (SBM) to improve the quality of education in schools is a model of educational management approach that provides schools with greater autonomy or independence in decision-making, involving all stakeholders such as principals, teachers, students, parents, and the community. This is compared to the previous centralized educational management paradigm that has long been in place, often making schools less responsive to local needs and the characteristics of individual students.*

**Keywords:** *Implementation, School-Based Management, Education Quality.*

### Pendahuluan

Pendidikan berkualitas atau bermutu menjadi pilar utama kemajuan suatu bangsa, karena melalui pendidikan dapat terbentuk generasi muda yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Namun, paradigma manajemen pendidikan yang sentralistik yang telah berjalan lama seringkali membuat sekolah kurang responsif terhadap kebutuhan lokal dan karakteristik siswa masing-masing. Kondisi ini mendorong munculnya model pengelolaan pendidikan yang lebih mandiri dan berpusat pada sekolah, yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

MBS adalah konsep yang mengedepankan desentralisasi kewenangan, di mana sekolah diberikan otonomi untuk mengambil keputusan terkait perencanaan, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program, hingga evaluasi kinerja. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBS dapat meningkatkan relevansi pendidikan, efisiensi pengelolaan, serta mempererat hubungan antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Misalnya, penelitian Farah Fadhilah Azhari (2025)

menunjukkan bahwa MBS dapat digunakan untuk mengembangkan program budaya islami di sekolah, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti rendahnya antusiasme dan keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, penerapan MBS juga menghadapi berbagai hambatan, seperti kesiapan sumber daya manusia yang belum memadai, keterbatasan anggaran, dan perlu sinkronisasi dengan kebijakan pusat. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas tentang konsep, prinsip, implementasi, manfaat, dan tantangan MBS menjadi sangat penting untuk mendukung upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah**

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model pengelolaan pendidikan yang bertujuan untuk memberdayakan sekolah agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misinya yang telah ditetapkan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan model manajemen sentralistik yang cenderung bersifat umum dan kurang mampu menyesuaikan diri dengan keberagaman kondisi serta kebutuhan di setiap sekolah. Menurut Suryadi (2018) dalam bukunya *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah. Konsep dan Aplikasi*, MBS dilakukan secara profesional dengan menjalankan fungsi manajemen siklus lengkap yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (doing), pemeriksaan (checking), dan tinjauan ulang (reviewing). Selain itu, dalam implementasinya, MBS juga mengelola tujuh komponen sumber daya yang saling terkait, yaitu manusia (man) yang mencakup guru, staf kependidikan, siswa, orang tua, dan masyarakat keuangan (money) yang meliputi anggaran operasional sekolah, bantuan pemerintah, serta kontribusi dari pihak luar bahan ajar (material) seperti buku pelajaran, modul pembelajaran, dan alat peraga metode pembelajaran (methods) yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kurikulum yang berlaku sarana prasarana (machine) seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya hubungan dengan masyarakat (market) yang melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal untuk mendukung program pendidikan serta waktu (minute) yang diatur secara efisien untuk memastikan setiap aktivitas pendidikan berjalan dengan lancar.

Konsep MBS berbeda dengan manajemen sentralistik, karena dalam MBS, sekolah memiliki wewenang yang lebih besar untuk membuat keputusan berdasarkan kebutuhan lokal, bukan hanya mengikuti peraturan dan pedoman yang ditetapkan secara seragam dari tingkat pusat. Dalam sistem sentralistik, keputusan terkait kurikulum, pengelolaan keuangan, hingga penentuan metode pembelajaran umumnya dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah tanpa memperhatikan karakteristik khusus setiap sekolah. Sebaliknya, MBS memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menyusun program dan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi geografis, budaya, sosial-ekonomi, serta potensi dan kebutuhan siswa di daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk membuat pendidikan lebih relevan dengan kondisi daerah dan karakteristik siswa masing-masing, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar

siswa dan membuat hasil pendidikan yang dihasilkan lebih bermanfaat bagi perkembangan lokal. Selain itu, MBS juga mendorong terciptanya kultur kebersamaan dan tanggung jawab bersama di antara seluruh komponen sekolah dan masyarakat sekitar dalam mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik.

### **Prinsip Dasar MBS**

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai model pengelolaan pendidikan yang memberdayakan sekolah, memiliki seperangkat prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaannya. Berdasarkan berbagai sumber dan juga acuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional' prinsip utama MBS meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Otonomi: Sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur diri, menyusun program, dan mengelola sumber daya sesuai dengan kebutuhan lokal. Menurut Mohrman dkk, otonomi secara luas menyangkut empat komponen penting yaitu kekuasaan atau kewenangan, pengetahuan dan keterampilan, informasi dan penghargaan . Dalam konteks Indonesia, otonomi ini mencakup kemampuan sekolah untuk menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan potensi daerah, mengelola anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta mengelola sumber daya manusia di lingkungan sekolah seperti pengaturan jadwal mengajar dan pengembangan kompetensi guru. Namun, otonomi ini tidak berarti sekolah bebas tanpa batasan, melainkan masih harus mengacu pada standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan.
2. Partisipasi: Seluruh pemangku kepentingan (kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat) terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sekolah. Tilaar berpendapat bahwa inti dari MBS adalah partisipasi masyarakat, dan hal ini terwujud melalui komite sekolah yang merupakan instrumen kunci dalam implementasi MBS. Partisipasi dapat berupa keterlibatan dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah, perencanaan program kerja tahunan, pengawasan pelaksanaan program, serta memberikan masukan dan dukungan dalam berbagai kegiatan sekolah. Misalnya, orang tua dapat berpartisipasi dalam rapat komite sekolah untuk membahas kebijakan sekolah terkait pembelajaran dan kesejahteraan siswa, sedangkan siswa dapat terlibat dalam pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler atau melalui badan pengurus osis yang menjadi wahana untuk menyampaikan aspirasi mereka.
3. Transparansi: Informasi mengenai anggaran, program pendidikan, dan kinerja sekolah terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. Prinsip ini menjadi dasar untuk mewujudkan akuntabilitas dan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Informasi anggaran seperti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus dapat diakses oleh masyarakat, baik melalui papan pengumuman di sekolah maupun melalui media daring yang dimiliki sekolah<sup>9</sup>. Begitu juga dengan informasi mengenai program pendidikan yang akan dilaksanakan, hasil evaluasi pembelajaran, dan kinerja guru serta staf sekolah. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap

pengelolaan sekolah dan memberikan masukan yang konstruktif.

4. Akuntabilitas: Sekolah bertanggung jawab atas hasil pendidikan yang dicapai dan penggunaan sumber daya yang diberikan. Prinsip akuntabilitas melibatkan transparansi, standar kinerja, dan partisipasi. Sekolah harus dapat menunjukkan bahwa sumber daya yang diterima, baik dari pemerintah maupun dari kontribusi masyarakat, digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, sekolah juga bertanggung jawab terhadap pencapaian standar kompetensi siswa, kualitas pembelajaran, dan pelayanan pendidikan yang diberikan. Akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui penyusunan laporan kinerja sekolah secara berkala yang kemudian disampaikan kepada dinas pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat
5. Desentralisasi: Kewenangan pengambilan keputusan didistribusikan dari tingkat pusat ke sekolah, sehingga sekolah dapat lebih fleksibel. Prinsip ini berdasarkan pandangan bahwa masalah yang muncul di sekolah akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya apabila penyelesaiannya diserahkan kepada pihak yang paling dekat dengan keberadaan masalah tersebut. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat atau daerah tidak lagi membuat keputusan secara seragam untuk semua sekolah, melainkan memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Hal ini memungkinkan sekolah untuk lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi, serta dapat mengembangkan inovasi dalam pengelolaan pendidikan
6. Kemitraan: Sekolah menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, komunitas lokal, dan lembaga pendidikan lain untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Prinsip kemitraan bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat baik berupa dukungan moral, pemikiran, tenaga, material, maupun finansial. Bentuk kemitraan dapat beragam, seperti kerja sama dengan pemerintah daerah untuk pengembangan sarana prasarana sekolah, kerja sama dengan komunitas lokal untuk penyediaan tenaga pengajar tamu atau untuk kegiatan belajar mengajar di luar sekolah, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan lain untuk melakukan pertukaran pengalaman dan sumber daya. Selain itu, sekolah juga dapat menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan praktik kerja atau untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan.

Selain prinsip-prinsip utama tersebut, beberapa sumber juga menyebutkan prinsip tambahan seperti kemandirian, efisiensi, efektivitas, dan berorientasi pada hasil yang menjadi bagian penting dalam implementasi MBS guna meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

### **Tahapan Implementasi MBS**

Implementasi MBS merupakan proses terpadu yang melibatkan empat tahap kunci yang saling terkait dan mendukung satu sama lain, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pendidikan serta memastikan sekolah dapat beroperasi secara

mandiri, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan lingkungan sekitar. Berikut rincian masing-masing tahap dengan penjelasan yang lebih mendetail:

#### 1. Perencanaan Strategis

Tahap ini menjadi fondasi utama dalam implementasi MBS, karena semua langkah selanjutnya akan berdasarkan rancangan yang disusun di tahap ini.

- a. Musyawarah Bersama Pemangku Kepentingan: Melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap sekolah, antara lain kepala sekolah, guru, staf tata usaha, siswa, orang tua murid, tokoh masyarakat, serta perwakilan dinas pendidikan daerah. Kegiatan musyawarah bertujuan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah yang tidak hanya sesuai dengan standar nasional pendidikan, tetapi juga mengakomodasi kondisi internal sekolah (seperti kapasitas sumber daya, karakteristik siswa) dan faktor eksternal (seperti kebutuhan industri lokal, potensi wilayah, serta peraturan yang berlaku di daerah).
- b. Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS): Setelah menetapkan tujuan, pihak sekolah menyusun rencana kegiatan yang terprioritaskan, dengan fokus utama pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Proses ini juga mencakup identifikasi dan pengelolaan berbagai sumber pendanaan, mulai dari bantuan pemerintah pusat dan daerah, kontribusi orang tua murid, serta kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga masyarakat. Selain itu, penyusunan RAPBS harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan pendidikan, termasuk tata cara pencatatan, penggunaan anggaran, dan mekanisme pengawasan yang berlaku.

#### 2. Pengelolaan Sumber Daya

Tahap ini bertujuan untuk mengelola segala sesuatu yang menjadi milik atau dapat dimanfaatkan oleh sekolah secara optimal agar mendukung terlaksananya program pendidikan:

- a. Pengelolaan Keuangan: Melakukan pengelolaan anggaran dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Semua transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, dicatat secara rinci dan akurat dalam buku besar sekolah yang sesuai dengan standar akuntansi pendidikan. Pihak sekolah juga wajib membuat laporan keuangan berkala (bulanan, triwulanan, dan tahunan) yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk melalui publikasi di papan informasi sekolah atau platform daring yang telah disiapkan.
- b. Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan: Melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan program pembelajaran dan jumlah siswa. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu, sekolah juga menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, seperti pelatihan teknis, lokakarya, studi banding, serta bimbingan dan pengembangan karir bagi guru dan staf. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk mengukur pencapaian target kerja, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan lebih lanjut, serta sebagai dasar untuk pemberian penghargaan atau peningkatan kinerja.
- c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana: Melakukan inventarisasi, pemeliharaan rutin, dan perbaikan fasilitas sekolah agar selalu dalam kondisi baik dan mendukung proses pembelajaran. Fasilitas yang dikelola meliputi ruang kelas, laboratorium,

perpustakaan, lapangan olahraga, kantin sekolah, toilet, serta infrastruktur pendukung seperti listrik, air bersih, dan jaringan internet. Selain itu, sekolah juga mengembangkan sistem pengelolaan barang milik sekolah untuk mencegah kerusakan atau kehilangan, serta memastikan penggunaan fasilitas dilakukan secara efektif dan sesuai dengan tujuan.

### 3. Pelaksanaan Program

Tahap ini merupakan tahap eksekusi dari semua rencana yang telah disusun, dengan fokus pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

- a. Penyelenggaraan Pembelajaran: Menyelenggarakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik individu siswa, tingkat kemampuan, serta kebutuhan lokal masyarakat. Hal ini mencakup penggunaan metode pembelajaran yang variatif dan inovatif, pengembangan materi ajar yang relevan dengan konteks daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Sekolah juga menjamin akses pendidikan yang setara bagi semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus atau berasal dari kelompok masyarakat yang kurang mampu.
- b. Pengembangan Ekstrakurikuler: Mengembangkan berbagai program ekstrakurikuler untuk mengoptimalkan potensi siswa di luar bidang akademik, seperti olahraga, seni budaya, keilmuan, organisasi siswa, dan kegiatan kewirausahaan atau kepemimpinan. Program ekstrakurikuler dirancang untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, serta nilai-nilai positif seperti kerja sama, disiplin, dan tanggung jawab.
- c. Pemberdayaan Orang Tua dan Masyarakat: Melibatkan orang tua murid dan masyarakat dalam berbagai kegiatan sekolah untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam mendukung pendidikan siswa. Kegiatan yang dilakukan antara lain pertemuan rutin orang tua murid, kerja bakti untuk perbaikan fasilitas sekolah, pembentukan kelompok kerja masyarakat untuk mendukung program pendidikan, serta pemanfaatan sumber daya lokal seperti tenaga ahli masyarakat untuk menjadi narasumber atau pembimbing pada kegiatan tertentu.

### 4. Evaluasi dan Monitoring

Tahap ini bertujuan untuk mengukur efektivitas implementasi MBS, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan.

- a. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi internal yang dilakukan oleh tim evaluasi sekolah sendiri, serta evaluasi eksternal yang melibatkan pihak luar seperti dinas pendidikan daerah, lembaga akreditasi, atau mitra kerja sama sekolah. Evaluasi dilakukan secara berkala (setidaknya satu kali dalam setahun) untuk mengukur pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, serta untuk menilai kualitas proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya, dan kontribusi sekolah terhadap perkembangan siswa dan masyarakat.
- b. Pemantauan Proses dan Kinerja: Melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap seluruh proses yang berjalan di sekolah, mulai dari pelaksanaan pembelajaran harian, kinerja guru dan staf, perkembangan akademik dan non-akademik siswa, hingga pengelolaan keuangan dan sarana prasarana. Data yang dikumpulkan selama pemantauan digunakan untuk mendeteksi masalah atau

hambatan yang muncul secara dini, sehingga dapat segera ditangani dengan solusi yang tepat.

- c. Pelaporan dan Transparansi: Menyusun laporan kinerja sekolah secara komprehensif yang mencakup hasil evaluasi dan pemantauan, serta informasi tentang penggunaan anggaran, pencapaian target, dan rencana perbaikan ke depannya. Laporan ini kemudian disebarluaskan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai saluran, seperti rapat umum orang tua murid, publikasi di website sekolah, atau penyampaian langsung kepada dinas pendidikan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat, serta untuk mendapatkan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sekolah di masa mendatang.

#### 5. Manfaat Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah MBS Penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) membawa dampak positif yang luas bagi seluruh komponen ekosistem pendidikan, mulai dari siswa sebagai penerima manfaat utama hingga masyarakat yang menjadi bagian dari lingkungan pendidikan. Dengan memberikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah dalam mengelola diri sendiri, MBS tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tetapi juga memperkuat peran sekolah sebagai pusat pembangunan sumber daya manusia di wilayahnya. Berikut adalah penjelasan mengenai manfaat implementasi MBS:

- a. Meningkatkan Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan Lokal Dan potensi siswa

Dalam sistem MBS, sekolah tidak lagi terikat pada kurikulum yang terlalu umum dan tidak sesuai dengan kondisi daerah. Sekolah memiliki kebebasan untuk menyusun program pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, seperti kebutuhan industri lokal, potensi ekonomi daerah, atau nilai-nilai budaya yang perlu dilestarikan. Misalnya, sekolah di kawasan perikanan dapat mengintegrasikan materi tentang teknologi budidaya ikan dan pengelolaan sumber daya alam, sementara sekolah di daerah perkotaan dapat mengembangkan modul tentang keterampilan digital dan kewirausahaan. Selain itu, pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan, minat, dan bakat masing-masing siswa, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Hal ini membuat pendidikan lebih bermakna dan memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

- b. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Sekolah

MBS mendorong sekolah untuk mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan lebih cermat, bertanggung jawab, dan fokus pada hasil. Dalam pengelolaan keuangan, sekolah dapat mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas kegiatan yang paling berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran, serta melakukan pemantauan penggunaan dana secara berkala untuk menghindari pemborosan. Proses pencatatan dan pelaporan yang transparan juga memastikan bahwa setiap transaksi dapat diawasi oleh pemangku kepentingan. Bagi sumber daya manusia, sekolah dapat merencanakan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program, melakukan rekrutmen berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan, dan menyelenggarakan program pengembangan karir yang sesuai dengan kebutuhan

guru dan staf. Sedangkan untuk sarana dan prasarana, sekolah melakukan inventarisasi rutin, pemeliharaan teratur, dan optimalisasi penggunaan fasilitas agar selalu mendukung proses pembelajaran, sehingga memperpanjang umur pakai dan mengurangi biaya yang tidak perlu

c. Mendorong Inovasi dalam Metode Pembelajaran dan Meningkatkan Profesionalisme Guru

MBS memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran. Guru dapat mencoba berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran daring, atau pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi informasi. Tanpa adanya pembatasan yang terlalu ketat dari pihak luar, guru dapat terus bereksperimen dan menemukan cara terbaik untuk membantu siswa memahami materi pelajaran. Selain itu, MBS juga memfasilitasi terjadinya kolaborasi antar guru dalam mengembangkan materi ajar, berbagi pengalaman mengajar, dan melakukan refleksi bersama terhadap praktik pembelajaran. Program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh sekolah juga dirancang berdasarkan kebutuhan aktual guru, sehingga lebih relevan dan memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas pengajaran. Semua hal ini berkontribusi pada peningkatan profesionalisme guru dan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa.

d. Mempererat Hubungan antara Sekolah dengan Orang Tua dan Masyarakat

Salah satu prinsip utama MBS adalah melibatkan orang tua murid dan masyarakat sebagai mitra aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Orang tua tidak hanya berperan sebagai pembayar uang sekolah, tetapi juga terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah melalui komite sekolah atau forum orang tua murid. Mereka dapat memberikan masukan tentang kebutuhan siswa, membantu mengawasi pengelolaan sekolah, atau bahkan berpartisipasi sebagai sukarelawan dalam kegiatan pembelajaran. Sementara itu, masyarakat dapat memberikan dukungan berupa sumber daya manusia, fasilitas, atau dana untuk mendukung program pendidikan. Misalnya, tokoh masyarakat atau profesional dari berbagai bidang dapat menjadi narasumber dalam kegiatan pembelajaran, atau perusahaan lokal dapat menyediakan tempat magang bagi siswa. Kolaborasi yang erat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan memberikan dukungan komprehensif bagi perkembangan siswa secara akademik dan non-akademik.

e. Meningkatkan Akuntabilitas Sekolah terhadap Semua Pihak Terkait

Implementasi MBS menuntut sekolah untuk bekerja secara transparan dan bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, orang tua murid, dan masyarakat. Sekolah diwajibkan untuk menyusun dan menyebarkan laporan kinerja secara berkala, yang mencakup informasi tentang pencapaian target pendidikan, penggunaan anggaran, perkembangan siswa, dan kondisi sarana prasarana. Selain itu, sekolah juga menjalani evaluasi secara berkala, baik secara internal oleh tim sekolah sendiri maupun secara eksternal oleh dinas pendidikan atau lembaga independen. Proses evaluasi ini membantu mengukur sejauh mana sekolah telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Akuntabilitas yang tinggi ini tidak hanya membantu meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, tetapi juga membangun kepercayaan dan

kredibilitas sekolah di mata masyarakat, sehingga mendorong partisipasi yang lebih besar dalam mendukung pendidikan.

f. Membantu Sekolah untuk Lebih Responsif terhadap Perubahan dan Tantangan

Di era yang penuh dengan perubahan dan perkembangan teknologi yang cepat, sekolah mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang terus berkembang. MBS memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh sekolah untuk dapat merespons perubahan dengan cepat dan tepat. Tanpa harus menunggu instruksi dari pihak pusat, sekolah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul, seperti mengintegrasikan teknologi baru ke dalam pembelajaran, mengembangkan program untuk menangani masalah sosial yang dihadapi siswa, atau menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Karena sekolah lebih mengenal kondisi lokal dan karakteristik siswa, mereka dapat merespon perubahan dengan cara yang lebih relevan dan efektif, sehingga pendidikan yang diberikan selalu sesuai dengan perkembangan zaman.

g. Meningkatkan Kemandirian dan Kepemimpinan dalam Lingkungan Sekolah

MBS membantu sekolah untuk menjadi lebih mandiri dalam mengambil keputusan dan mengelola aktivitas sehari-hari. Kepala sekolah dan tim manajemen sekolah diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan mereka dalam merencanakan strategi, mengorganisir sumber daya, mengarahkan kegiatan sekolah, dan mengawasi kinerja seluruh komponen sekolah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas manajemen sekolah, tetapi juga menciptakan budaya organisasi yang mandiri, inovatif, dan bertanggung jawab. Selain itu, siswa juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemandirian dan kepemimpinan melalui partisipasi dalam organisasi siswa, kegiatan ekstrakurikuler, atau proyek pembelajaran yang melibatkan tanggung jawab pribadi dan kerja sama kelompok. Hal ini membantu siswa untuk menjadi individu yang mandiri, memiliki rasa tanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

## Simpulan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model pengelolaan pendidikan yang menekankan pada pemberian otonomi kepada sekolah untuk mengatur dan mengelola sumber dayanya secara mandiri, dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. MBS hadir sebagai solusi untuk menyesuaikan kebijakan dan program dengan kebutuhan lokal.

Pelaksanaan MBS didasarkan pada prinsip otonomi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, desentralisasi, dan kemitraan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Implementasinya dilakukan melalui tahapan perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program, serta evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, MBS terbukti memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan relevansi pendidikan, efisiensi pengelolaan sekolah, inovasi pembelajaran, profesionalisme guru, serta memperkuat hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Dengan demikian, MBS menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan menjadikan sekolah lebih responsif terhadap perubahan serta kebutuhan siswa dan lingkungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Depdiknas. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2007.
- Mohrman, S. A., Wohlstetter, P., & Associates, School-Based Management: Organizing for High Performance, San Francisco: Jossey – Bass, 1994.
- Mulyasa, E. Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012.
- Suryadi, Manajemen Mutu Berbasis Sekolah: Konsep dan Aplikasi. Bandung : Alfabeta, 2018.
- Tilaar, H.A.R. Manajemen Pendidikan Nasional. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wohlstetter, P., & Mohrman, S. A. (1996). Assessment of School-Based Management : Findings and Implications, Educational Evaluation and policy Analysis, 1996.